

**RUMUSAN HASIL PERTEMUAN
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA IKAN (FKPPS) NASIONAL TAHUN 2014
AMBON, PROVINSI MALUKU
19s/d 20 Maret 2014**

Dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, telah dilaksanakan pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (FKPPS) Nasional pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2014 di Ambon, Provinsi Maluku dengan tema: **"Pengelolaan Pemanfaatan SDI yang Berkelanjutan Melalui Implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM)"**.

Pertemuan FKPPS Nasional dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan dihadiri oleh Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Maluku; Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, Direktur Sumber Daya Ikan, Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan yang diwakili oleh Prof. Dr. Wudianto, A.P.U; Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan yang diwakili oleh Kasubdit Alokasi Usaha; perwakilan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; perwakilan Direktorat Pelabuhan Perikanan; Kepala atau Pejabat yang mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Seluruh Indonesia; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku; Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat seluruh Indonesia; Kepala Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan; Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB); Akademisi Perguruan Tinggi (Institut Pertanian Bogor; Universitas Mulawarman; Universitas Mataram, Universitas Kristen Artha Wacana; Universitas Hasanuddin, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu (STPL), Universitas Halu Oleo; dan Universitas Pattimura, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas Darussalam Ambon,); Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia; Perwakilan Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Perwakilan Asosiasi Perikanan (Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu (Aspertadu), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Asosiasi Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI), International Pole and Line Foundation (IPLF), Yayasan Lestari Alam Indonesia (LINI); Himpunan Nelayan Purse seine Nusantara (HNPN), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani); Pelaku Usaha Penangkapan Ikan, Yayasan WWF-Indonesia; *The Nature Conservancy (TNC); Conservation International (CI); Greenpeace; Sustainable Fisheries Partnership*, Pakar Perikanan dari *Indonesia Marine and Climate Support Project (IMACS), Marine Protected Area Governance (MPAG); National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA)*; Pakar Perikanan, pelaku usaha, dan peserta lainnya.

Memperhatikan :

(1) Sambutan Gubernur Maluku pada pembukaan FKPPS Nasional 2014; (2) Arahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang **Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dengan Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM)**; (3) Presentasi Direktur Sumber Daya Ikan tentang **RPP untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan dengan Pendekatan Ekosistem (EAFM) dan**

Evaluasi Pelaksanaan FKPPS Nasional 2012; (4) Presentasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tentang **Harapan-harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tentang FKPPS;**(5) Presentasi Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan tentang **Kajian Ilmiah bagi Pengelolaan Perikanan di WPP-NRI;** (6)Presentasi Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan tentang **Potensi Sumber Daya Ikan di WPP-NRI;** (7) Presentasi Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tentang **Kebijakan Alokasi dan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan di WPP-NRI;**(8) Presentasi Kepala Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB) mengenai **Memperkuat Pengelolaan Perikanan di Indonesiamelalui Implementasi Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (EAFM);** (9) Presentasi Kasubdit SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan tentang **Sosialisasi Revisi Permen Nelayan Andon dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan;** (10) Presentasi Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas tentang **Kebijakan RFMO's dalam Rangka Pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas;** (10) Presentasi Kasubdit Data dan Statistik Perikanan Tangkap tentang **Penguatan data dan statistik dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan;** (11) Presentasi Kasubdit Evaluasi Pengelolaan SDI tentang **Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan dan Observer dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan;**(12) Presentasi Kasubdit SDI Perairan Umum tentang **Kelembagaan Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum;**(13) Presentasi Kasubdit SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan tentang **Pembahasan Rapermen KP tentang Koordinator Pengelola dan Penanggung Jawab FKPPS di WPP-NRI;** (14)Presentasi Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas tentang **Rencana Pengelolaan Perikanan WPP-NRI 718;** (15)Diskusi Penyusunan Rencana Aksi Nasional di 11 WPP-NRI.

Serta mempertimbangkan saran dan masukan, Forum merumuskan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan landasan hukum yang kuat dan spesifik dalam penerapan pendekatan ekosistem bagi pengelolaan perikanan (*ecosystem approach to fisheries management/EAFM*) di Indonesia, oleh karena itu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan menyiapkan naskah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penerapan EAFM di Indonesia dalam waktu 1 tahun;
2. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap di WPP-NRI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan melanjutkan upaya proses pembentukan kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di WPP-NRI 718 sebagai percontohan bagi pengembangan kelembagaan pengelolaan perikanan bagi WPP-NRI lainnya di Indonesia.
3. Untuk meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan oleh aktifitas andon penangkapan ikan, dibutuhkan penyempurnaan dan pengesahan ketentuan tata laksana andon, dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam waktu 1 tahun.
4. Sebagai dasar pengelolaan perikanan di 11 WPP-NRI perlu diusulkan Penetapan RPP WPP yang telah disusun dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan pemangku kepentingan akan melanjutkan proses review RPP 9 WPP-NRI dan melanjutkan penyusunan RPP WPP-NRI 716 dan 717 (sebagaimana terlampir) yang selanjutnya draft akan di bahas pada acara FKPPS Wilayah yang akan di laksanakan pada akhir bulan

Mei 2014 bertempat di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta pada awal bulan Juni 2014 bertempat di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Guna melengkapi dan memutakhirkan data dan informasi tentang situasi perikanan di masing-masing WPP-NRI, maka setiap provinsi menyiapkan data dukung meliputi aspek: sumber daya ikan, ekosistem, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Data dan informasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya Ikan, cq. Subdit SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan FKPPS Nasional 2014.
7. Hasil rumusan berikut kesepakatan FKPPS Nasional Tahun 2014, harus didukung dengan pendanaan yang cukup dan dialokasikan dalam APBN, APBD dan sumber lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2016.
8. Rumusan FKPPS Nasional Tahun 2014, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah.
9. FKPPS Nasional Tahun 2016 akan diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Ambon, 20 Maret 2014

Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc
Direktur Sumber Daya Ikan

Perwakilan WPP 571	Perwakilan WPP 572	Perwakilan WPP 573
Raihanah DKP Prov. Aceh	Ir. Yosmeri DKP Prov. Sumbar	Ir. Lalu M. Syafriadi DKP Prov. Jawa Tengah
Perwakilan WPP 711	Perwakilan WPP 712	Perwakilan WPP 713
Ir. Gatot Rudiyo, SH. MM DKP Prov. Kalbar	Dede Suhendar, A.Pi, M.P DKP Prov. Jabar	Ganef Wugianto, A.Pi DKP Prov. NTT
Perwakilan WPP 714	Perwakilan WPP 715	Perwakilan WPP 716
Ir. Burhanudin Unu DKP Prov. Sultra	Ir. Yohanis Riga, M.Si DKP Prov. Sulteng	Ir. Jimmy Winerungan, SH DKP Prov. Sulut
Perwakilan WPP 717		Perwakilan WPP 718
Septianus Kadiwaru, S.Pi		Ir. Bastian Mainassy, M.Si

DKP Prov. Papua Barat

DKP Prov. Maluku